

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup memainkan peran penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memastikan ketersediaan sumber daya alam. Lingkungan hidup yang sehat berguna dalam menyediakan kebutuhan untuk manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi, kebutuhan akan pangan dengan mengolah nutrisi yang terdapat pada alam, mengelola dan menjaga tanah agar tetap subur, menjadi habitat baik untuk seluruh makhluk hidup, mengontrol iklim agar terhindar dari cuaca ekstrem serta berperan meresap emisi penyebab pemanasan global. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup merupakan suatu ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup layaknya manusia serta tingkah perilakunya yang dapat mempengaruhi kondisi alam, kelangsungan kehidupan maupun kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya.

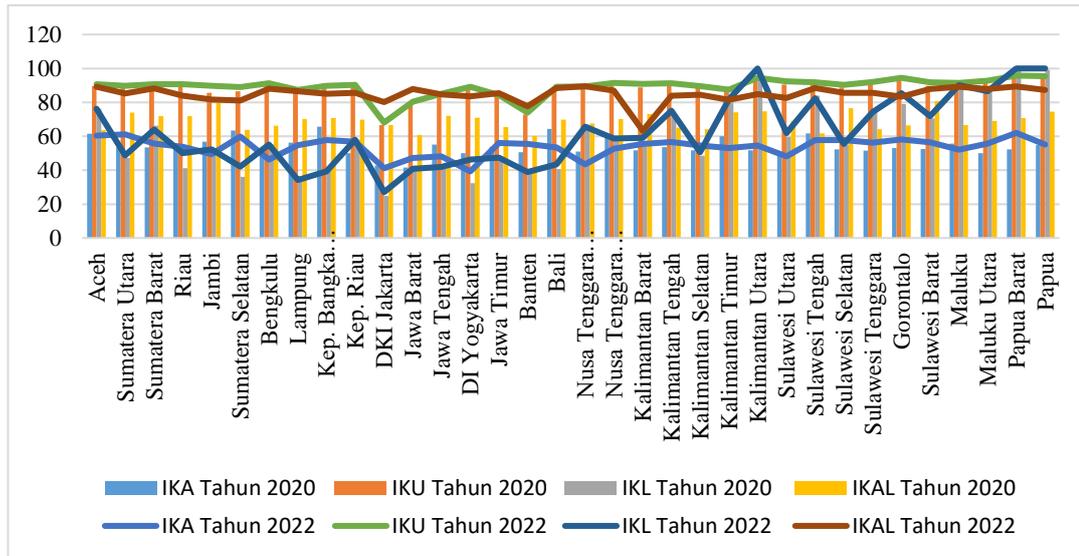
Pada tahun 2009 telah dikembangkan suatu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berupa indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut yang dijadikan sebagai komponen kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). IKLH berguna dalam mengevaluasi kualitas lingkungan serta tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional. Lingkungan hidup yang berkualitas dapat didefinisikan sebagai kondisi lingkungan yang mampu memberi daya dukung serta memfasilitasi kelangsungan hidup yang optimal.

Paul Ehrlich mendeskripsikan populasi dan lingkungan pada bukunya tahun 1971 berjudul "*The Population Bomb*". Teori IPAT (*Impact on Environment, Population, Affluence, Tecnology*) menjelaskan adanya hubungan berlipat ganda dari polusi, populasi dan konsumsi terhadap dampak lingkungan (Chapman, 1999). Ehrlich dan Holdren (1972) mengemukakan penduduk dan pendapatan menjadi aspek yang dapat menumbangkan lingkungan. Hal ini diikuti inovasi teknologi yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan (Wicaksana & Karsinah, 2022).

The Limits to Growth (1972) membahas kemungkinan pertumbuhan ekonomi dan populasi eksponensial dengan pasokan sumber daya yang terbatas. Kelanjutan dari pertumbuhan eksponensial populasi manusia dan ekonomi, dikombinasikan dengan sifat terbatas sumber daya dan kemampuan bumi untuk mengasimilasi polusi, akhirnya mengarah pada ketidakstabilan dalam kondisi dasar ekonomi global, dan penurunan besar dalam kualitas hidup. Di dalam proses pertumbuhan, modal harus semakin banyak digunakan untuk memperoleh sumber daya, sehingga akhirnya investasi tidak dapat mengimbangi depresiasi (Hall, 2022).

Eksplorasi dan upaya pemanfaatan kekayaan alam yang tidak hati-hati dapat meningkatkan kerentanan, hal ini menjadi konsekuensi atas masalah yang tidak dapat dihindari. Kerusakan lingkungan seringkali dianggap sebagai “*cost*” yang harus dibayar untuk “*manfaat*” dari pembangunan ekonomi. Bencana yang seringkali terjadi dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang. Potensi tekanan pada pembangunan pada akhirnya akan meningkatkan belanja pemerintah terhadap mitigasi bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan pencemaran. Dari riset yang telah dilakukan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menunjukkan bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling melalui izin investasi industri ekstraktif. Belum lagi, dengan limbah sisa produksi industri yang berpotensi mengakibatkan kerusakan alam tidak terkendali apabila tidak dikelola secara optimal (WALHI, 2021).

Pembangunan yang mengabaikan pilar keberlanjutan akan menggerus PDB Indonesia antara 0,13% sampai 7% (setara US\$ 7 miliar) yang ditimbulkan oleh biaya lingkungan terhadap pencemaran air dan udara terkait degradasi lahan dan dampak perubahan iklim. Pembangunan yang tidak berkelanjutan juga akan berimplikasi pada peningkatan kemiskinan karena 40% sampai 80% pendapatan rumah tangga miskin di sebagian negara berkembang diperoleh dari alam (Fauzi, 2019). Untuk itu diperlukan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup isu lingkungan yakni pada tujuan 6 memastikan masyarakat mencapai akses air bersih dan sanitasi layak; tujuan 12 produksi - konsumsi yang bertanggung jawab; tujuan 13 penanganan terhadap perubahan iklim; tujuan 14 melestarikan sumber daya sektor kelautan dan tujuan 15 peningkatan pemanfaatan atas ekosistem daratan.



Sumber: (KLHK, 2020), (KLHK, 2022)

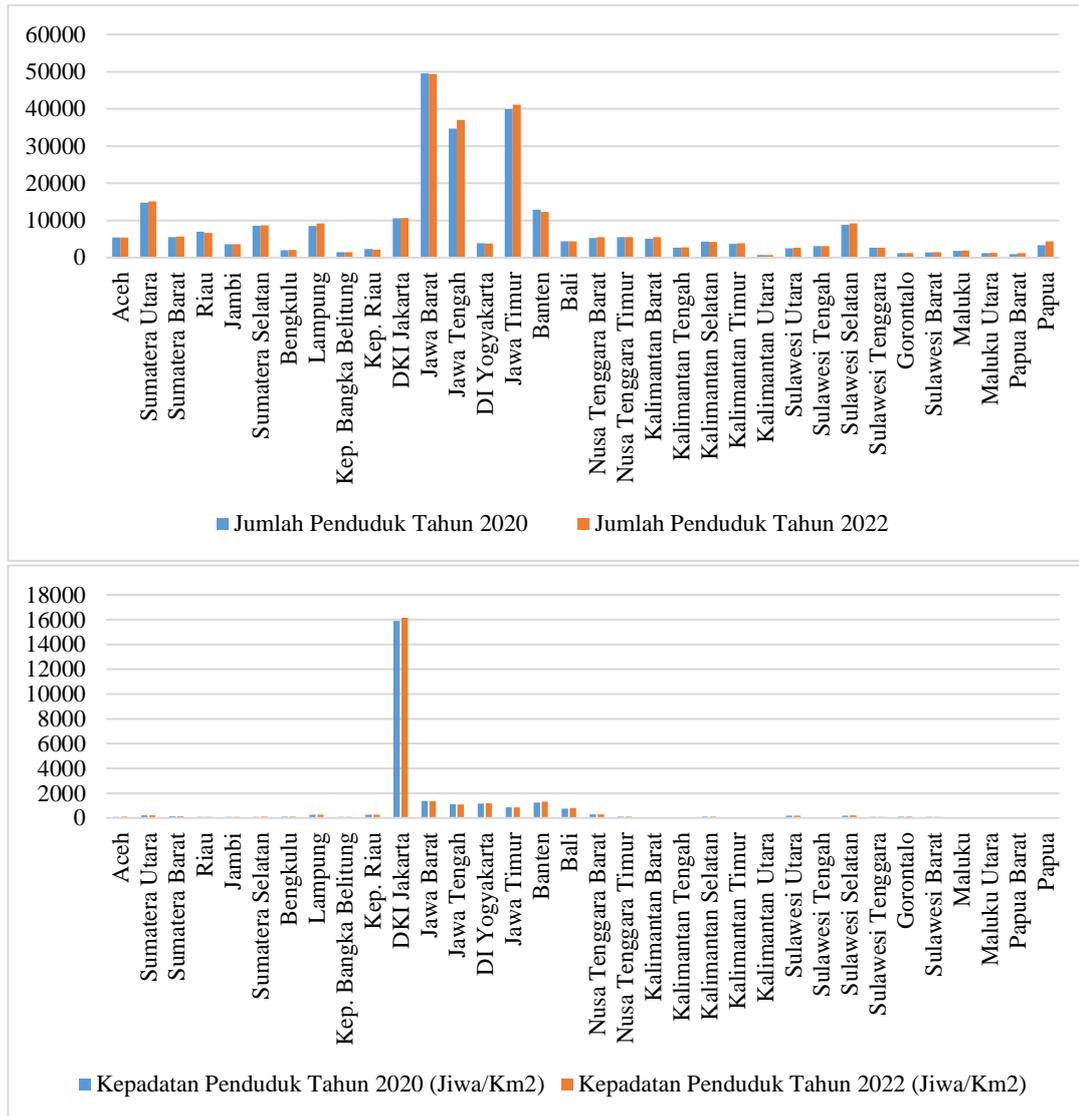
Grafik 1. Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 2020 dan 2022

Kualitas lingkungan dapat dilihat salah satunya melalui Indeks Kualitas Air (IKA) yang pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin menjadi 53,53 dibandingkan pada 2019. Meskipun mengalami peningkatan, nilai tersebut belum memenuhi target RPJMN sebesar 55,10. Hal tersebut disebabkan parameter seperti *biological oxygen demand* dan fekal koli tidak memenuhi target, seperti di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 41,5. Hal ini menunjukkan pencemaran dari aktivitas rumah tangga menjadi penyebab penurunan kualitas air. Pada tahun 2022 nilai IKA hanya naik diangka 53,88 dari target yang seharusnya 55,30. Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai IKA 39,31 terendah nasional yang disebabkan aktivitas seperti MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan industri kecil yang membuang limbah ke sungai. Indeks Kualitas Udara (IKU) 2020 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan nilai 87,21 namun capaian IKU di beberapa provinsi masih belum terpenuhi seperti DKI Jakarta yang hanya sebesar 66,69. IKU tahun 2022 meningkat menjadi 88,06 dan DKI Jakarta masih menjadi yang terendah dengan nilai 68,06. Jakarta sebagai kota besar tentu memiliki masalah lingkungan seperti polusi udara karena banyaknya penduduk dan kendaraan serta kurangnya ruang terbuka hijau.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggambarkan kondisi hutan dan lahan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 59,54 sehingga belum memenuhi

target yaitu sebesar 61,90. Nilai IKL pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 60,55 namun belum memenuhi target sebesar 63,90. Provinsi dengan IKL terendah adalah DKI Jakarta sebesar 24,86 pada tahun 2020 dan 27,07 pada tahun 2022, kondisi ini yang menjadi salah satu faktor penyumbang berulangnya bencana banjir di Jakarta karena banyaknya alih fungsi lahan. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami penurunan 2,55 poin dari tahun 2019 menjadi 68,94 pada Tahun 2020 namun melebihi target RPJMN sebesar 58,5 poin. Pada tahun 2022 nilai IKAL meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 84,41 poin. Provinsi Banten memiliki nilai IKAL terendah pada tahun 2020 sebesar 60,12 sedangkan pada tahun 2022 provinsi yang memiliki nilai IKAL terendah adalah Kalimantan Barat yakni sebesar 63,30 poin. Pemantauan kualitas air laut dilakukan pada daerah pesisir, maka diperlukan pengelolaan yang tepat terhadap objek bahari, pelabuhan maupun muara dan menetapkan target kenaikan IKAL yang progresif sehingga dapat mendongkrak IKAL Nasional.

Kerusakan lingkungan lebih banyak disorot di negara berkembang bahwa ledakan penduduk yang lebih banyak di negara berkembang menjadi akar masalah persoalan lingkungan di kelompok negara ini. Bertambahnya populasi penduduk di suatu wilayah akan memicu peningkatan terhadap permintaan barang dan jasa yang perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan tempat tinggal, air untuk kehidupan sehari-hari, dan udara yang bersih (Jayanti, 2017). Bertambahnya jumlah penduduk membuat alih fungsi hutan dan lahan pertanian semakin sedikit, ketersediaan udara bersih semakin berkurang, resapan air pun ikut berkurang, sehingga berpotensi menurunkan kesehatan lingkungan (Dotulong et al., 2018). Semasa pandemi yang muncul di awal tahun 2020, limbah medis rumah tangga dan fasilitas kesehatan, bertambahnya produksi sampah perkotaan serta berkurangnya aktivitas daur ulang menjadi hal yang tak dapat dihindari, sehingga memberikan tekanan pula kepada lingkungan. Di era normal baru, masyarakat dunia menghadapi dampak multidimensi berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Tak hanya memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian, namun peristiwa tersebut telah menghambat upaya dalam berbagai hal yang telah ditargetkan pada pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya pengelolaan lingkungan.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Grafik 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020 dan 2022

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada September 2020 tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2022 meningkat menjadi 275,77 juta jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan populasi 49 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk di suatu daerah dapat membawa akibat kepada tekanan yang kuat terhadap lingkungan, penurunan mutu air seiring dengan hasil limbah dari aktivitas penduduk dan industri mempercepat terjadinya pencemaran. Meskipun tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, Jawa Barat

Rahma Andini Eriyanto, 2023

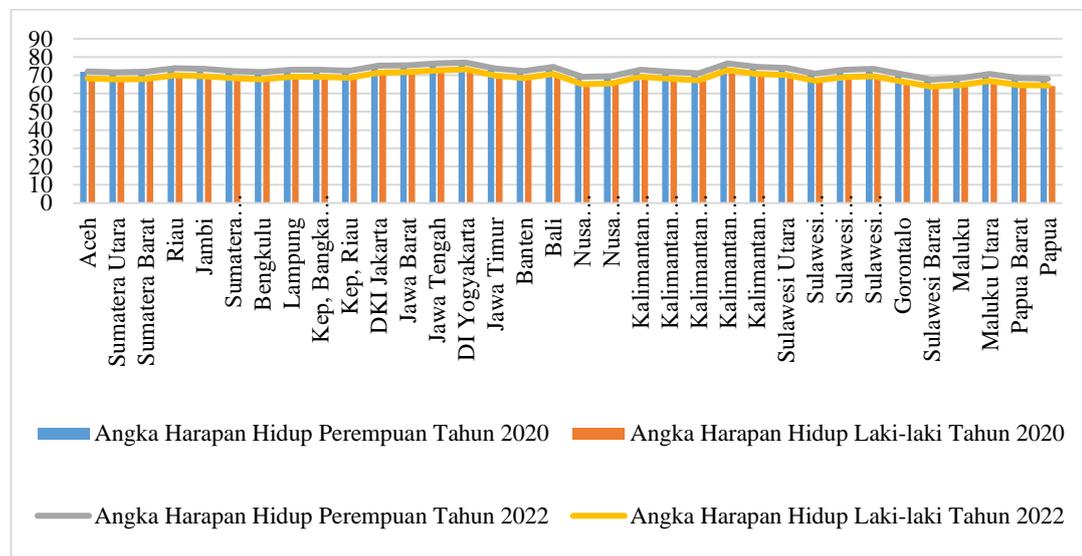
ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

tidak dikategorikan sebagai daerah dengan kepadatan paling tinggi. Kepadatan penduduk tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 15,907 jiwa/km² pada tahun 2020 dan 16,158 jiwa/km² pada tahun 2022. Seiring dengan pulihnya perekonomian dan terkendalinya kasus Covid-19 memicu perpindahan penduduk dari daerah ke Jakarta. Kondisi lingkungan hidup diperkotaan dapat semakin memburuk akibat kepadatan di masing-masing wilayah (Akhirul et al., 2020). Tingginya kepadatan penduduk dapat menyebabkan masalah seperti alih fungsi lahan, munculnya pemukiman tempat tinggal kumuh dan lingkungan yang tidak sehat. Pada tahun 2022 saat kasus Covid-19 mulai melandai, mobilitas serta aktivitas masyarakat cenderung normal, namun kemacetan dan polusi udara yang menandai buruknya kualitas udara kembali meningkat.

Pemerintah senantiasa melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Salah satu metrik yang digunakan dalam menilai pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diukur melalui indikator kesehatan, yang dilihat dari angka harapan hidup penduduk. Indonesia dalam hal ini menghadapi tantangan ganda untuk menumbuhkan ekonomi sambil melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Grafik 3. Angka Harapan Hidup Indonesia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2022

Angka harapan hidup Provinsi DI Yogyakarta tertinggi pada 2020 berada di angka 75,03 tahun dan pada 2022 berada di angka 75,10 tahun. Di sisi lain, Provinsi

Rahma Andini Eriyanto, 2023

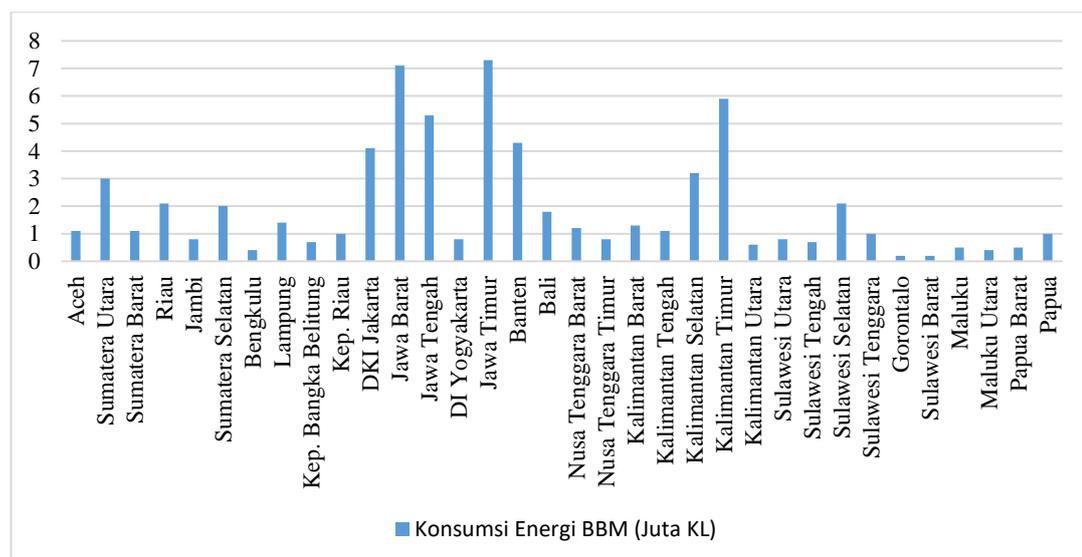
ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Sulawesi Barat memiliki nilai terendah dengan angka harapan hidup 65,11 tahun pada 2020 dan 65,67 pada 2022. Angka harapan hidup suatu daerah dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat, layanan kesehatan, kebijakan pemerintah, maupun tingkat ekonomi masyarakat. Dari riset *Air Quality Life Index* (AQLI), Indonesia belum memenuhi ambang batas aman kualitas udara untuk konsentrasi partikel PM2.5 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Untuk itu diperkirakan bahwa penduduk Indonesia bisa kehilangan 2,5 tahun usia harapan hidup. Keadaan lingkungan yang kurang baik, polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan membuat udara bersih sulit untuk dihirup dan masyarakat rentan terserang penyakit pernapasan (*Air Quality Life Index*, 2021).

Peningkatan terhadap jumlah penduduk akan menimbulkan bertambahnya kegiatan konsumsi energi diiringi dengan pembangunan dan sarana transportasi yang meningkat dapat menyebabkan turunnya kualitas udara (Dotulong et al., 2018). Disisi lain, Indonesia dihadapkan pada kecenderungan peningkatan kebutuhan dan konsumsi energi (Kementerian ESDM, 2021). Energi fosil yang selama ini menjadi tumpuan dalam konsumsi energi, berdampak pada terkurasnya sumber daya alam, semakin tingginya dampak pada kerusakan lingkungan karena kadar polusi cukup tinggi, serta menghasilkan suhu udara menjadi meningkat.



Sumber: (Dewan Energi Nasional, 2021)

Grafik 4. Konsumsi Energi BMM (Bahan Bakar Minyak) Menurut Provinsi Tahun 2020 (Juta Kilo Liter)

Rahma Andini Eriyanto, 2023

ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

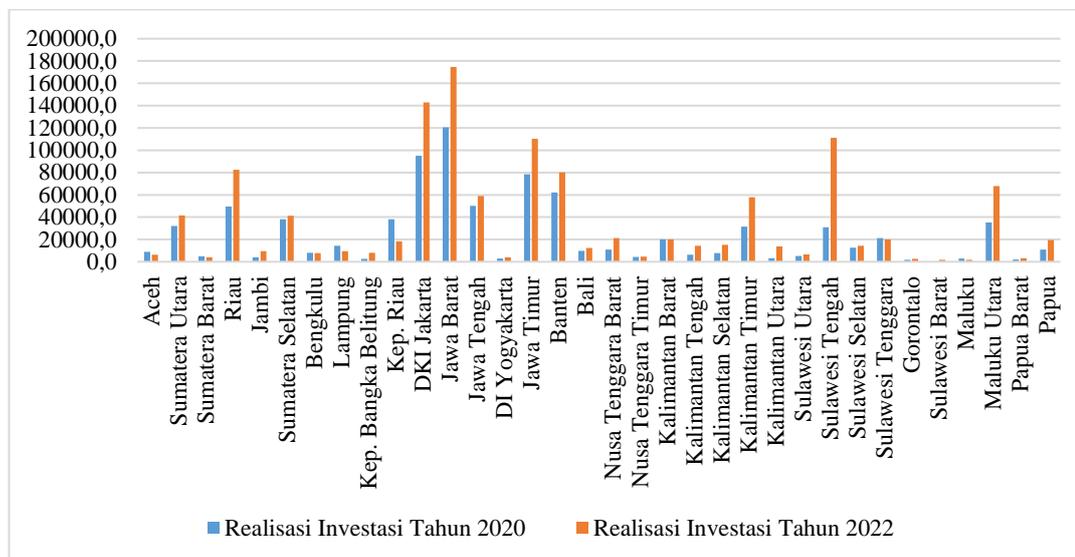
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Dilihat berdasarkan wilayahnya, energi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagian besar dikonsumsi oleh Regional Jawa-Bali sekitar 48%, diikuti oleh wilayah Sumatera sebesar 21% dan Kalimantan sebesar 18%. Jika dilihat menurut provinsinya, konsumsi BBM terbesar yakni Jawa Timur sebesar 7,3 juta kilo liter, diikuti Jawa Barat sebesar 7,1 juta kilo liter. Besarnya konsumsi energi BBM di region Jawa-Bali sejalan dengan tingginya mobilitas dan banyaknya kendaraan di wilayah tersebut. Konsumsi energi sektor transportasi darat masih cukup tinggi karena ditunjang jasa pengiriman barang yang frekuensinya meningkat pada masa pandemi sejalan dengan peningkatan perdagangan *online*. Konsumsi energi sektor industri juga menggunakan BBM untuk beberapa proses produksi dan generator sebagai alat penghasil listrik untuk menggerakkan mesin di sektor konstruksi.

Pembakaran energi fosil akan mengeluarkan gas seperti karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂) yang mengakibatkan pencemaran (hujan asam/kabut asap/pemanasan global). Pemanfaatan minyak mentah melalui penyimpanan dan pengangkutan yang tidak tepat akan menyebabkan tumpahan minyak (ke laut, sungai maupun air tanah) dapat menimbulkan pencemaran air. Sehubungan dengan lapisan tanah, masalah terjadi selama kegiatan penambangan terbuka. Penambangan membutuhkan lahan yang luas dan endapan batubara biasanya berada pada tanah yang subur, apabila digunakan untuk pertambangan, nantinya lahan tersebut sulit digunakan kembali untuk pertanian maupun kehutanan dalam jangka waktu tertentu (Agustin, 2022).

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan proses menuju perubahan, dimana kegiatan seperti pemanfaatan sumberdaya, aliran investasi, arah pengembangan teknologi dan perubahan terhadap kelembagaan berjalan selaras. Realisasi investasi Indonesia didapatkan melalui penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Secara langsung, investasi mampu membuat produksi meningkat, penambahan nilai dan ekspor (Komariyah et al., 2019). Investasi memiliki efek tidak langsung pada transfer teknologi, pelatihan kerja, pengetahuan, eksternalitas, efisiensi, serta produktivitas. Di sisi lain, investasi juga dapat berkontribusi terhadap eksternalitas, disebabkan oleh polusi industri yang tinggi serta degradasi lingkungan hidup. Pada industri padat karya dan padat modal berpolusi berat dapat memberi beban negatif terhadap lingkungan, sebaliknya pada

industri padat modal yang minim akan pencemaran lingkungan cenderung berdampak ke arah positif (Silvia et al., 2021).



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021), (Badan Pusat Statistik, 2023)

Grafik 5. Realisasi Investasi Menurut Provinsi Tahun 2020 dan 2022

Realisasi investasi Indonesia pada 2020 sebesar Rp 826,3 triliun dan melampaui target dari yang ditetapkan sebesar Rp 817,2 triliun. Pada tahun 2022 setelah melewati ketidakstabilan perekonomian global, realisasi investasi Indonesia mampu meningkat mencapai Rp 1.207 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.200 triliun. Penanaman modal dalam negeri mendominasi 50,1% atas total investasi Indonesia di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 54,2% realisasi investasi Indonesia merupakan penanaman modal asing. Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan kepercayaan investor untuk kembali berinvestasi di Indonesia pasca pandemi. Jawa Barat merupakan provinsi yang menyerap investasi terbesar sepanjang tahun 2020 dan 2022. Jawa Barat berkontribusi sebagai penyedia listrik regional Jawa-Bali. Sektor dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Barat antara lain transportasi gudang dan telekomunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Tingginya nilai investasi tersebut tentu harus dibarengi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, regulasi ketat terhadap penggunaan lahan dan limbah. Investasi hijau perlu dilakukan dalam mengurangi pencemaran lingkungan, termasuk efektivitas konservasi energi, pengurangan emisi, pertumbuhan keterampilan inovasi dan teknologi (Hafiza et al., 2023).

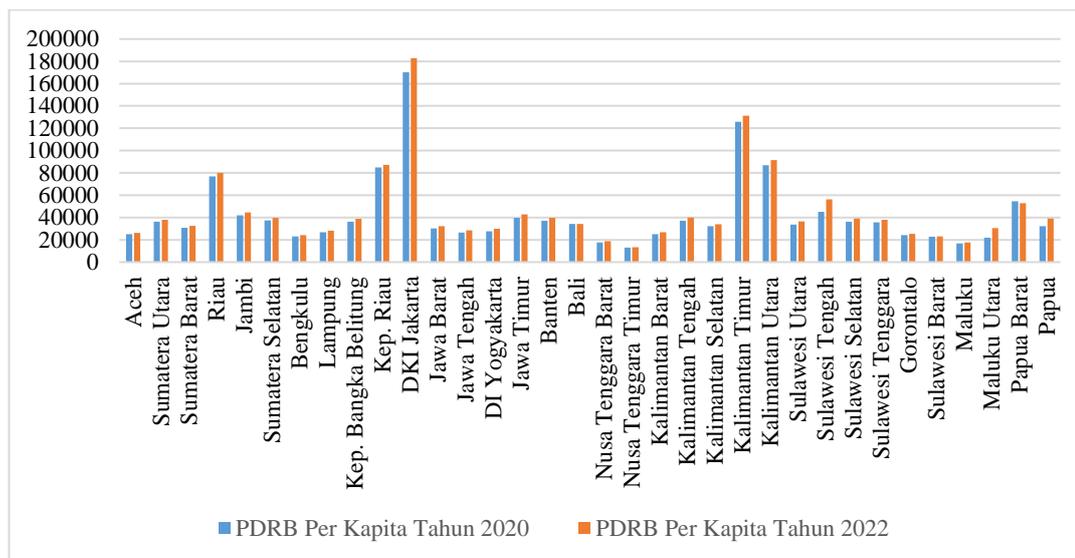
Rahma Andini Eriyanto, 2023

ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Masalah penting dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana menempuh adanya *trade-off* antara kegiatan pembangunan dengan upaya perlindungan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui keadaan perekonomian daerah suatu negara pada periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB per kapita umumnya digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran, nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah sehingga memicu daya beli terhadap barang dan jasa (Lailani & Maulida, 2022).



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Grafik 6. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Harga Konstan 2010 (Ribu Rupiah) Tahun 2020 dan 2022

Produk domestik regional bruto seringkali dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran masyarakat. DKI Jakarta menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan distribusi PDRB per kapita terbesar di Indonesia yakni Rp 170089,02 pada tahun 2020 dan Rp 182908,69 pada tahun 2022. Nilai tersebut meningkat setelah pandemi menurun yang diimplementasikan dengan mulai normalnya kembali masyarakat untuk beraktivitas maupun bekerja di luar rumah serta melakukan kegiatan konsumsi. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan PDRB per kapita terbesar kedua serta ketiga yakni Rp 131136,62 dan Rp 91424,16 pada tahun 2022. Perekonomian DKI Jakarta cenderung ditopang dengan perdagangan besar dan eceran. Disisi lain, Pulau Kalimantan memiliki keunggulan akan kekayaan sumber daya alam serta perkebunan, antara lain pertambangan

Rahma Andini Eriyanto, 2023

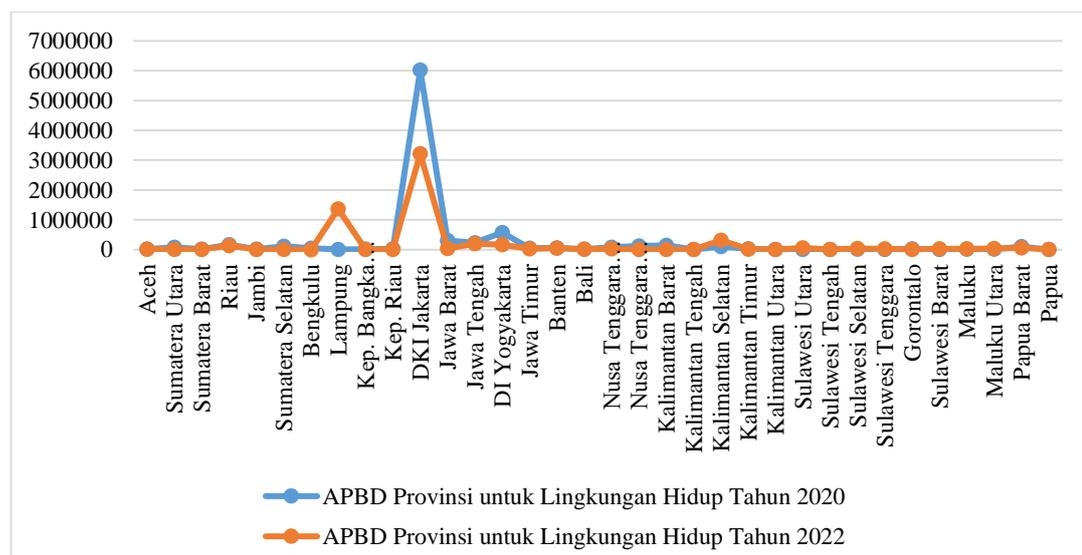
ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

batubara dan perkebunan sawit. Jika PDRB per kapita suatu wilayah mampu tumbuh diiringi tingkat populasi yang stabil, hal ini berpotensi dalam mendorong kemajuan teknologi yang dapat menghasilkan lebih banyak pada tingkat populasi yang sama. Seiring dengan industrialisasi ekonomi dan pengembangan wilayah, maka pendapatan akan meningkat dan berperan pada konsumsi material secara masif. Peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan juga berdampak terhadap lebih banyak konsumsi barang sehingga menghasilkan peningkatan jumlah limbah. Perubahan dalam kesejahteraan dapat pula mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Dalam hal ini, kenaikan pendapatan masih mengorbankan lingkungan karena minat publik yang rendah untuk bidang lingkungan (Lavany, 2022).

Untuk mendukung konsep pembangunan yang mengutamakan lingkungan, diperlukan peningkatan alokasi khusus dalam mengatasi krisis lingkungan melalui realokasi komposisi belanja pemerintah terhadap barang publik dan mengoptimalkan peran anggaran lingkungan. Pilar penting pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian lingkungan, yaitu melalui pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan sedemikian rupa sehingga terkendali dari emisi dan polusi. Peran terpenting dalam menciptakan kelestarian lingkungan salah satunya adalah penerapan ekonomi hijau, yang juga mencakup anggaran khusus sebagai daya dukung lingkungan hidup (Yuda & Idris, 2022).



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)

Grafik 7. APBD Provinsi untuk Lingkungan Hidup Menurut Provinsi (Juta Rupiah) Tahun 2020 dan 2022

Rahma Andini Eriyanto, 2023

ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Anggaran fungsi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya, pada tahun 2020 sebesar Rp 6019,84 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 3213,639. Meskipun demikian, DKI Jakarta dianggap masih memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kurang baik jika dilihat berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada dikisaran angka 54,65 masih jauh dari titik referensi 100. Tingginya anggaran lingkungan hidup DKI Jakarta sudah seharusnya sebanding dengan penanganan lingkungannya, seperti program percepatan pengendalian pencemaran udara, air, dan pengelolaan sampah. Kedepannya realisasi anggaran harus lebih baik dari anggaran yang telah dialokasikan, penghapusan program yang dinilai kurang efektif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Penganggaran dinilai masih sangat minim terhadap sektor lingkungan hidup. Anggaran lingkungan pun tidak sepenuhnya berhubungan langsung dengan perbaikan lingkungan hidup, seperti halnya banyak diarahkan untuk kegiatan sosialisasi, rapat dan koordinasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian (Yuda & Idris, 2022) memberikan kesimpulan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif tidak signifikan, variabel pertumbuhan ekonomi positif signifikan, sedangkan anggaran lingkungan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Pertumbuhan Populasi Penduduk memiliki pengaruh positif signifikan, sementara Konsumsi Energi berpengaruh positif signifikan terhadap Emisi Karbondioksida (Pratama, 2020). Disisi lain, (Putra & Adry, 2022) memberikan hasil penelitian bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi, dan Infrastruktur Transportasi memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap kualitas lingkungan 6 (enam) Negara ASEAN.

Penurunan terhadap kualitas lingkungan hidup tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia semata, juga sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya yang tak terkendali dan faktor lainnya. Penelitian mengenai lingkungan hidup sangat penting dalam upaya pemulihan kondisi lingkungan dari keadaan sebelumnya. Kualitas hidup generasi mendatang ditentukan oleh kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini, karenanya menjadi perhatian penting untuk mengetahui

keadaan lingkungan hidup di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk penelitian ini dengan judul “**Analisis Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia.**”

I.2 Perumusan Masalah

Proses pembangunan sudah semestinya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, namun setiap individu memiliki tingkat kerentanan yang berbeda dalam menghadapi bahaya. Bencana yang seringkali terjadi dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang, yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan. Jika dilihat berdasarkan masing-masing wilayah, nilai indeks kualitas lingkungan hidup baik air, udara, lahan, maupun air laut cenderung timpang, hal ini yang kemudian perlu menjadi perhatian bersama. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar maka akan semakin besar pula kebutuhan masyarakat di dalamnya, seperti air dan udara bersih maupun tempat tinggal. Keadaan lingkungan hidup pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan masyarakat, sejalan dengan setiap penurunan perilaku hidup bersih dan pengelolaan kesehatan lingkungan, angka harapan hidup juga akan menurun. Ekstraksi sumber daya alam, seperti energi fosil tanpa regulasi yang ketat dapat memberikan efek buruk pada lingkungan. Penanaman modal tanpa diiringi kepatuhan dalam menaati kebijakan dan regulasi lingkungan dapat memiliki dampak lingkungan yang lebih negatif daripada positif. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang sedang menuju peningkatan, efek terhadap lingkungan pun dapat semakin tinggi. Pengelolaan anggaran yang kurang tepat sasaran terhadap penanganan lingkungan menyebabkan anggaran lingkungan hidup tidak mampu dikelola secara optimal.

Peneliti ingin melakukan *assessment* terkait kualitas lingkungan hidup pada 34 provinsi di Indonesia dengan metode *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) melakukan penilaian atau memilih sejumlah alternatif dalam jumlah terbatas. Salah satu metode untuk menyelesaikan masalah MCDM adalah *PROMETHEE* (*Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation*) merupakan salah satu dari banyak metode penentuan urutan atau prioritas dalam analisis multi-kriteria untuk mencapai keberlanjutan (Karim, 2018). Metode *PROMETHEE* dilakukan melalui perhitungan bobot dan mengatasi masalah *multicriteria* pada

selisih antar kriteria (Saqdiyah et al., 2022). *PROMETHEE* berperan dalam analisis strategi keberlanjutan dengan menimbang dan mengurutkan daerah mana yang perlu menjadi prioritas pembangunan, maupun perbaikan kualitas lingkungan.

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk melakukan *assessment* dan memberikan hasil urutan (*ranking*) terkait kualitas lingkungan hidup dengan membandingkan kondisi tahun 2020 dan 2022 pada 34 provinsi di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan serta ilmu pengetahuan, menjadi rujukan serta bahan pengembangan bidang yang diteliti pada penelitian ini, yakni terkait dengan kualitas lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pengimplementasian ilmu terkait dengan permasalahan ekonomi serta lingkungan yang terjadi, menambah wawasan peneliti terkait variabel yang diteliti, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap urgensi pelestarian lingkungan hidup.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai sumbangan gagasan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, khususnya pada ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

c. Bagi mahasiswa dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan menjadi media eksplorasi gagasan bagi mahasiswa untuk berkarya, dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti berikutnya, serta menumbuhkan sikap kritis dan kepedulian akan kondisi ekonomi dan lingkungan yang terjadi.